

ABSTRAK

Pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui Undang-Undang No.39 Tahun 2004 dan Pepres No.81 Tahun 2006 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Penelitian ini bermaksud untuk; 1. Untuk mengetahui sejauh mana peran BNP2TKI dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Arab Saudi dilakukan dengan beberapa upaya seperti; a) dalam menekan dan memperkecil permasalahan TKI pada pra penempatan; b) dalam menekan dan memperkecil permasalahan TKI pada penempatan; c) dalam menekan dan memperkecil permasalahan TKI pada purna penempatan; 2. BNP2TKI melakukan kesepakatan bersama antar Indonesia-Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan dengan; a) upaya pra pembentukan *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Indonesia-Arab Saudi; b) Upaya pembentukan *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Indonesia-Arab Saudi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang mengamati hubungan antar variabel-variabel yang ada kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban permasalahan yang ada. Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi dimaksimalkan melalui BNP2TKI. Namun dalam segala upaya dan pelaksanaannya itu semua perlu waktu dan proses yang cukup panjang, mengingat segala permasalahan pada TKI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah melakukan upaya diplomasi, pengajuan MoU dengan Negara yang bersangkutan agar TKI mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Sejauh ini pemerintah melalui BNP2TKI telah membangun kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Kerjasama itu bermaksud untuk membuat suatu kesepakatan tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. BNP2TKI telah berupaya maksimal dalam perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia, Pemerintah, BNP2TKI, Penempatan, Perlindungan, permasalahan Tenaga Kerja Indonesia